

Analisis penerimaan pajak daerah dan pengaruhnya terhadap pendapatan perkapita Kota Jambi

Nurhayati

Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1). penerimaan komponen pajak daerah dalam pembentukan total pajak daerah Kota Jambi; 2). pendapatan perkapita penduduk Kota Jambi; 3). pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan perkapita penduduk Kota Jambi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kuantitatif menggunakan model regresi linear. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan rata-rata proporsi realisasi penerimaan pajak daerah terhadap total pajak daerah di Kota Jambi tahun 2001-2013 terbesar adalah proporsi pajak penerangan jalan. Sedangkan komponen pajak daerah yang menyumbang terkecil terhadap total penerimaan pajak daerah tahun 2001-2013 adalah pajak galian. Selama periode tahun 2001-2013, rata-rata pendapatan perkapita penduduk Kota Jambi adalah sebesar 6.080.453. Selanjutnya berdasarkan analisis regresi diperoleh bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan perkapita Kota Jambi.

Kata kunci: Pajak daerah, Pendapatan perkapita, Pajak penerangan jalan, Pajak galian

PENDAHULUAN

Salah satu perwujudan dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat terlihat dari besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung setiap tahunnya. PDRB dapat disubkan sebagai alat untuk mengetahui struktur ekonomi suatu wilayah, dan menjadi indikator penting dalam menentukan arah pembangunan. Peran masing-masing sektor dalam PDRB dapat menentukan skala prioritas pembangunan. Tingkat pertumbuhan riil PDRB mencerminkan keberhasilan pembangunan yang sudah dilaksanakan suatu daerah.

Sebagai salah satu indikator ekonomi, PDRB merupakan bahan acuan dalam melakukan evaluasi dalam perencanaan program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan. Hasil penghitungan ini diharapkan dapat menggambarkan keadaan perekonomian suatu wilayah yang sesungguhnya. Terikat dengan itu, PDRB Kota Jambi berdasarkan harga konstan 2000 menunjukkan pada tahun 2001 sebesar Rp 1.880.456.790.000, di tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 5,27 persen, dengan nilai PDRB sebesar Rp 1.979.625.910.000. Di tahun 2004 PDRB Kota Jambi sebesar Rp 2.372.027.340.000 dan naik sebesar 5,69 persen ditahun 2005 menjadi Rp 2.506.910.320.000. Pada tahun 2007 PDRB Kota Jambi sebesar 2.845.549.620.000 meningkat menjadi sebesar Rp 3.020.126.510.000 di tahun 2008 atau mengalami peningkatan 6,14 persen. Begitu pula di tahun 2010 PDRB Kota Jambi sebesar Rp 3.429.619.050.000 meningkat menjadi sebesar Rp 3.688.601.410.000 di tahun 2011 atau mengalami peningkatan 7,55 persen, lebih tinggi di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 PDRB Kota Jambi sebesar Rp 4.185.677.530.000 mengalami peningkatan sebesar 6,47 persendari tahun sebelumnya. Secara rata-rata

selama tahun 2001-2013 PDRB Kota Jambi atas dasar harga konstan 2000 mengalami peningkatan 6,92 persen pertahunnya. (BPS Kota Jambi, 2013).

Dalam rangka mendukung sumber pembiayaan pembangunan daerah, perlu dikembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip keadilan, efisiensi, dan efektifitas untuk menambah penerimaan daerah tersebut. Sejalan dengan kebijakan fiskal, Khusaini (2006) mengatakan bahwa pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Dalam usaha meningkatkan penerimaan daerah, pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang terbesar dan juga yang terpenting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. sebagai tindak lanjut dari usaha peningkatan kemampuan pemerintah dalam mengerahkan dan memanfaatkan hasil-hasil sumber keuangan yang berasal dari potensi daerahnya sendiri, khususnya pajak daerah yang didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang pembagian kewenangan pusat dan daerah (Pandiangan dalam Hesti Agustina, 2009). Adapun realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Jambi pada tahun 2001 adalah sebesar Rp 5.258.010.165,27 di tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 40,99 persen, dengan realisasi pajak daerah sebesar Rp 7.413.268.758,10. Di tahun 2004 realisasi pajak daerah Kota Jambi sebesar Rp 15.486.371.434,99 dan naik sebesar 11,21 persen ditahun 2005 menjadi Rp 17.222.508.425,55. Pada tahun 2007 realisasi pajak daerah Kota Jambi sebesar Rp 20.542.952.806,26 meningkat menjadi sebesar Rp 24.431.170.152,28 di tahun 2008 atau mengalami peningkatan 18,93 persen. Begitu pula di tahun 2010 realisasi pajak daerah Kota Jambi sebesar Rp 35.538.249.793,25 meningkat menjadi sebesar Rp 59.567.461.145,47 di tahun 2011 atau mengalami peningkatan 67,62 persen. Pada tahun 2013 realisasi pajak daerah Kota Jambi sebesar Rp 87.235.665.206,88 mengalami peningkatan sebesar 18,94 persen dari tahun sebelumnya. Secara rata-rata selama tahun 2001-2013 realisasi pajak daerah Kota Jambi mengalami peningkatan 27,99 persen pertahunnya, (Dispenda Kota Jambi, 2013).

Bertitik tolak dari pemikiran dan kenyataan itu, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1). penerimaan komponen pajak daerah dalam pembentukan total pajak daerah Kota Jambi; 2). pendapatan perkapita penduduk Kota Jambi; 3). pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan perkapita penduduk Kota Jambi.

LANDASAN TEORI

Keuangan negara dan keuangan daerah

Menurut Suparmoko (2000), yang dimaksud dengan Ilmu Keuangan negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama yang mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta pengaruh didalam perekonomian tersebut. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula dengan sesuatu (baik uang maupun barang) yang menjadi kekayaan negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Syamsi, 1994).

Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan penganggaran pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan. Terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan

peningkatan kemakmuran yang merata. Sejalan itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 34 tahun 2000 menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Penerimaan negara dan daerah

Menurut Suparmoko (2000) penerimaan negara adalah semua penerimaan kas umum (kas pemerintah pusat) atau kas daerah (kas pemerintah daerah) dari berbagai sumber yang sah, yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat atau daerah. Dalam arti yang luas, penerimaan atau pendapatan negara adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, percetakan uang, pinjaman daerah, menjalankan berbagai pungutan dari masyarakat yang didasarkan undang-undang.

Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. Pendapatan asli daerah, terdiri dari pajak-pajak daerah retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan ali daerah lain yang sah.
2. Dana perimbangan, terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak dan bantuan keuangan Propinsi
3. Pinjaman daerah, yaitu pinjaman dari Bank, pinjaman berupa obligasi dengan persetujuan pusat, pinjaman dari luar negeri dengan persetujuan pusat, pinjaman dari pemerintah pusat dan lain-lain
4. Lain-lain pendapatan yang sah, antara lain seperti, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda (denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi) dan lain sebagainya.

Pendapatan asli daerah

Menurut Suparmoko (2002), Pendapatan asli daerah (PAD) mempunyai peranan penting dalam pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Besar kecilnya pendapatan asli daerah sebagai sumber utama bagi pembiayaan kegiatan pembangunan daerah mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah, semakin besar kebutuhan yang di biayai dengan pendapatan asli daerah mencerminkan semakin tingginya kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan atau kegiatan sendiri.

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan daerah, oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah.

Sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Pajak daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Pajak daerah adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas mereka untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani, 1992). Selanjutnya dikatakan oleh Suparmoko (2002) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu pertama sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai alat untuk mengatur alokasi dan distribusi suatu kegiatan ekonomi dalam satu daerah atau wilayah tertentu. Jadi secara umum pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak daerah itu sendiri mengandung beberapa aspek, diantaranya sebagai alat untuk membiayai rumah tangga daerah dan penetapan sepenuhnya diakui oleh undang-undang dan peraturan daerah dan didalam pajak tidak terdapat kontraprestasi atau imbalan jasa yang dapat ditunjuk langsung. Secara garis besar, (Sukirno, 2006) membedakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung.

Pendapatan perkapita

PDRB perkapita merupakan konsep dari pendapatan perkapita yang diimplementasikan penjelasannya pada lingkup regional/daerah. Besarnya pendapatan per kapita di suatu daerah mencerminkan aspek pemerataan pendapatan dengan menggunakan besarnya nilai rata-rata keseluruhan pendapatan rumah tangga dalam perekonomian daerah. Pendapatan per kapita menggambarkan kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah. Konsep pendapatan per kapita seperti ini dianggap masih relevan untuk menerangkan terbentuknya jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

Apabila pendapatan perkapita meningkat, maka kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah akan semakin meningkat. Ini berarti kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok di daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Jika kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok meningkat, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan berkurang. Sebaliknya, apabila pendapatan per kapita di daerah berkurang/menurun, maka akan menurun pula kemampuan pendapatan rata-rata masyarakat di daerah tersebut. Jika kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok menurun, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

Hubungan pajak dan pendapatan perkapita

Mengkaji hubungan PAD (pajak daerah) dengan PDRB disini akan melihat adanya hubungan yang fungsional, yaitu pad merupakan fungsi dari PDRB. dengan

meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah untuk pembangunan program-program pembangunan. selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya. Dari paparan peacock dan wiseman (1961) diketahui, bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat, dan semakin meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat (Mangkoesobroto, 1998). Miller dan russex (1997), telah meneliti pengaruh struktur fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah di amerika serikat yang mengalami defisit anggaran. dengan menggunakan alat analisis random effects model, hasil penelitian mereka adalah : pertama, peningkatan surplus anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi. ini hanya dapat tercapai apabila pajak pendapatan perusahaan (*corporates income tax*) ditingkatkan dan pengeluaran sektor pendidikan, transportasi publik dapat ditekan. kedua, pajak penjualan (*sales tax*) dan pajak lainnya digunakan untuk transfer payment, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun, sebaliknya jika pajak pendapatan perusahaan yang digunakan untuk transfer payment, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. ketiga, pajak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, jika digunakan untuk membiayai pendidikan, transportasi publik dan keamanan publik.

METODE

Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder Kota Jambi berdasarkan kurun waktu 2001-2013, mencakup penerimaan pajak daerah Kota Jambi, PDRB Kota Jambi ADHK 2000, penduduk Kota Jambi, PDRB Perkapita Kota Jambi. Sumber data terutama berasal dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Jambi dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi

Metode analisis data

Untuk menganalisis penerimaan komponen pajak daerah dan pendapatan perkapita dilakukan secara deskriptif. Selanjutnya untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan perkapita penduduk digunakan analisis regresi sebagai berikut :

$$Y = a + bx + e$$

Persamaan tersebut di formulasikan dalam bentuk logaritma menjadi:

$$\text{Log PDRB/Kap} = a + b \text{ LogPD} + \mu$$

Keterangan :

PDRB/Kap = Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PD = Pajak Daerah

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi Pajak daerah

μ = Standar Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proporsi Penerimaan Komponen Pajak Daerah Dalam Pembentukan Pajak Daerah Kota Jambi.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pajak daerah yang mampu memberikan kontribusi terbesar bagi total pajak daerah di Kota Jambi tahun 2001-2013 adalah komponen pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan menyumbang rata-rata sebesar 56,99 persen dari total penerimaan pajak daerah di Kota Jambi. Sedangkan komponen pajak daerah yang menyumbang terkecil terhadap total penerimaan pajak daerah tahun 2001-2013 adalah pajak galian. Disisi lain komponen pajak daerah baru yang masuk dalam komponen pajak daerah yaitu pajak parkir selama tahun 2011-2013 berhasil menyumbang sebesar 0,92 persen dari total penerimaan pajak daerah dan pajak BPHTB menyumbang sebesar 31,46 persen.

Pendapatan Perkapita Penduduk Kota Jambi

Selama tahun 2001-2013 PDRB perkapita penduduk Kota Jambi rata-rata adalah sebesar Rp 6.080.453. Besaran PDRB perkapita ini disumbang oleh peningkatan PDRB perkapita disetiap tahunnya. PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh peningkatan PDRB secara total, yaitu PDRB ADHK. Selain itu peningkatan PDRB perkapita juga sangat tergantung dari peningkatan jumlah penduduk. Apabila PDRB total meningkat lebih besar dari peningkatan jumlah penduduk, maka PDRB perkapita akan mengalami peningkatan yang tinggi pada tahun itu. Sebaliknya, Apabila PDRB total meningkat lebih kecil dari peningkatan jumlah penduduk, maka PDRB perkapita akan mengalami peningkatan yang rendah pada tahun itu.

PDRB perkapita penduduk Kota Jambi pada tahun 2001 yaitu sebesar Rp 4.896.630 meningkat menjadi sebesar Rp 5.708.447 di tahun 2005. Lima tahun berikutnya di tahun 2010 PDRB perkapita penduduk Kota Jambi berhasil mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 6.448.386 dan diakhir tahun 2013 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 7.465.650.

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Perkapita Di Kota Jambi

Estimasi persamaan regresi pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan perkapita Kota Jambi diberikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{LogPDRB/kap} &= 5,202 + 0,153 \text{ LogPD} \\ t \text{ stat} &= (35,275) + (10,717) \\ R^2 &= 0,913 \end{aligned}$$

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,913 artinya variasi (turun/naiknya) pendapatan perkapita 91,3 persen disebabkan variasi (turun/naiknya) pajak daerah (PD) sedangkan sisanya 8,7 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Dari hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel Pajak Daerah sebesar 10,717. dengan tingkat keyakinan ($\alpha=5\%$) $df=(11)$ untuk pengujian diperoleh nilai t_{tabel} 1,796. Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($10,717 > 1,796$), artinya H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Pajak Daerah Kota Jambi berpengaruh signifikan terhadap PDRB/kap Kota Jambi. Dengan demikian hipotesis menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah dengan PDRB/kap di Kota Jambi tahun 2001-2013.

Selanjutnya dari koefisien parameter estimasi pajak daerah (PD) sebesar 0,153. Artinya, Jika variabel lain dianggap tetap/tidak berubah maka, maka kenaikan 1 persen

pajak daerah Kota Jambi akan meningkatkan PDRB perkapita Kota Jambi rata-rata sebesar 0,153 persen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Rata-rata proporsi realisasi penerimaan pajak daerah terhadap total pajak daerah di Kota Jambi tahun 2001-2013 terbesar adalah proporsi pajak penerangan jalan. Sedangkan komponen pajak daerah yang menyumbang terkecil terhadap total penerimaan pajak daerah tahun 2001-2013 adalah pajak galian.
2. Rata-Rata pendapatan perkapita Kota Jambi tahun 2001-2013 adalah sebesar Rp 6.050.453
3. Penerimaan pajak daerah di Kota Jambi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan perkapita.

Saran

1. Proporsi komponen pajak penerangan jalan yang besar memberikan konsekuensi bagi pemerintah untuk menjaganya, selain diiringi dengan peningkatan komponen pajak lainnya, melalui peningkatan objek dan subjek pajak. Peningkatan penerimaan dari komponen pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah yang telah terjadi lebih distabilkan dan di mobilisasi oleh pemerintah daerah Kota Jambi agar dampaknya lebih dirasakan signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah harus mendorong peningkatan pajak daerah sebagai sumber pembangunan daerah, sehingga dengan peningkatan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan perkapita.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Hesty, 2007. *Analisis penerimaan pajak daerah dan kaitanya dengan PDRB Kabupaten Sarolangun*, Skripsi, Fakultas Ekonmi Universitas Jambi.
- Arif, dkk. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Akademia. Jakarta.
- Basri, H.; Delis, A; Junaidi . (2014). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 81-90
- BPS, 2014. *Kota Jambi Dalam Angka*. BPS. Provinsi Jambi.
- Dani, 2008. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kerinci*. Skripsi FE UNJA (tidak di npublikasikan)
- Darwanto dan Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akutansi X. Makasar. Terdapat dalam <http://repository.usu.ac.id>.
- Halim. 1997. *Manajemen Keuangan Daerah*. FE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Halim, A. 2001. *Anggaran Daerah dan "Fiscal Stress" (sebuah studi kasus pasa Anggaran Daerah Propinsi di Indonesia)*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. FE-UGM, Yogyakarta.
- Hasibuan, 1996. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan*, Penerbit LP3ES. Jakarta
- Hermawati, L. 2004. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Penerbit PSIEPP-UNSRI. Palembang

- Irwan, 2006,” *Pengaruh PDRB Kota Jambi terhadap penerimaan Retribusi Daerah Kota Jambi selama periode 1994-2003*”. Skripsi FE-UNJA.
- Jhingan ML ,2000. *Ekonomi Pembangunan Perencanaan*, PT Raja Grafindo Persada.
- Jhingan. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Junaidi,J; Zulgani,Z. (2011). Peranan Sumberdaya Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, Edisi 3, 27-33
- Khusaini, M, 2006. *Ekonomi Publik (Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. BPFE Unibraw, Malang.
- Munawir,H. 1997. *Perpajakan*. Liberti. Yogyakarta.
- Saputra, Ryan. 2007. *Analisis Perkembangan Penerimaan Daerah Kota Jambi Dari Bagian Pendapatan Asli Daerah Periode 1996 – 2005*. Skripsi. fakultas Ekonomi Universitas Jambi.
- Sukirno, sadono, 2006, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sudono. 2010. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi III. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Supangat, A, 2007, *Statistika, dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Non Parametrik*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Suparmoko,1997. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*.BPFE, Yogyakarta.
- Suparmoko, 2000. *Keuangan Negara Edisi 5*, BPFE, Yogyakarta.
- Suparmoko,2001. *Ekonomi publik (Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*,edisi 1,andi.Yogyakarta.
- Suparmoko, M, 2002. *Ekonomi Publik (untuk Keuangan dan Pembangnan Daerah)*, Andi, Yogyakarta.
- Supriana, tavi. 2008. *Ekonomi Makro*. Terbitan Pertama. USU Press. Medan.
- Syamsi, I. 1994. *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tambunan,T TH. 2003.*Perekonomian Indonesia*, Edisi I. Penerbit Ghalia. Indonesia.
- Todaro,M. P. 2004. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga.Buku Dua*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia.